

MODEL DINASTI POLITIK DI KOTA BONTANG

Paisal Akbar¹ dan Eko Priyo Purnomo²

¹Graduate School of Master of Government Affairs and Administration,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

²Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
E-mail: paisal.akbar.psc19@mail.umy.ac.id ; eko@umy.ac.id

ABSTRAK.

Penelitian ini menjelaskan dinasti politik Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga membahas terkait model dan prestasi keluarga politik dalam memimpin Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif terhadap fenomena yang sedang terjadi, penekanan penelitian ini bersifat interpretif. Hasil dari pada penelitian ini menemukan bahwa keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam telah menjadi keluarga politik yang eksis di Kota Bontang. Sementara itu untuk Model dinasti politik yang dimiliki kota bontang ialah model arisan dan model lintas kamar, dimana model arisan diwujudkan dengan pemberian regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik, sementara itu model lintas kamar diwujudkan dengan pembagian penguasaan oleh suami dan istri serta ibu dan anak didalam tampuk kekuasaan eksekutif dan legislatif di Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga menemukan bahwa kepemimpinan dari keluarga politik memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan Kota Bontang hal ini dilihat dari berbagai macam prestasi dan penghargaan yang diterima Kota Bontang selama keluarga politik ini berkuasa.

Kata Kunci: Bontang; Dinasti Politik; Keluarga Politik

POLITICAL DYNASTY MODEL OF BONTANG CITY

ABSTRACT.

This research explains the political dynasty of Bontang City. This academic research also discusses the model and achievements of political families in leading the City of Bontang. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive method for the phenomenon that is happening, the emphasis of this research is interpretive. The results of this study found that the political family of Andi Sofyan Hasdam and Neni Moerniaeni and their son Andi Faisal Sofyan Hasdam had become an existing political family in the City of Bontang. Meanwhile for the political dynasty model owned by the city of Bontang is the arisan model and the cross-room model, where the arisan model is realized by giving the regeneration of power to the political family, while the cross-room model is realized by the division of mastery by husband and wife and mother and child in power. executive and legislative branches in bontang city. This academic research also found that the leadership of the political family had a good impact on the development of the City of Bontang, as seen from the various achievements and awards received by the City of Bontang during this political family in power.

Key words: Bontang; Political Dynasty; Political Family

PENDAHULUAN

Pembahasan terkait perpolitikan nasional dan daerah pasca Orde Baru di Indonesia sangat menarik untuk diteliti (Yusoff & Agustino, 2012). Dalam pelaksanaannya, cita-cita reformasi mengamanahkan agar dapat mewujudkan kehidupan bernegara yang tidak lagi bersifat sentralistik tetapi diwujudkan dengan otonomi daerah (Farhani & Rosnidah, 2018; Malik, 2014). Munculnya sebuah fenomena sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia terjadi karena hasil daripada

keinginan untuk terlepas dari sifat pusaran politik yang terpusat atau sentralistik pada masa Orde Baru yang menuntut untuk dibangunnya kekuasaan yang menjauh dari pemusatan politik atau desentralisasi (Nordholt, 2005; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Dalam perjalanannya otonomi daerah kemudian melahirkan sistem dinasti politik yang mengakar (Bathoro, 2011; Pahrudin, 2018; Susanti, 2018).

Dinasti politik telah menjadi sebuah fenomena yang berlangsung lama di negara-negara yang menganut nilai-nilai demokrasi (Mendoza dkk., 2016; Susanti, 2018). Mendoza

dkk,(2016) mengungkapkan bahwa Dinasti politik di negara-negara berkembang didirikan dengan landasan kekayaan dan jaringan kekeluargaan. Sementara itu di negara-negara maju dinasti politik didirikan berdasarkan nama besar trah kekeluargaan (Sembiring & Simanihuruk, 2018) yakni (Susanti (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dinasti politik adalah sebuah sistem yang melahirkan kekuasaan yang bersifat primitif dikarenakan bertolak ukur dari darah dan keturunan oleh orang-orang tertentu. Secara lebih sederhana dinasti politik dapat diartikan sebuah rezim kekuasaan politik yang dikelola secara turun temurun atau melalui ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dekat (Komar, 2013; Pahrudin, 2018; Sutisna, 2017).

Suharto dkk, (2017) juga mengungkapkan dinasti politik sebagai pelaksanaan politik yang berbasis kekeluargaan. Olehkarenanya, dinasti politik hadir sebagai upaya untuk memberikan estafet posisi-posisi strategis kepada saudara, kerabat, dan keluarga untuk mendirikan suatu 'kerajaan' politik di dalam pemerintahan baik dalam tataran lokal maupun nasional (Agustino & Yusoff, 2010).

Indonesia dalam hal ini menganggap hadirnya fenomena dinasti politik tidak lepas dari peran keluarga politikb (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Peran keluarga politik itu sendiri ditandai dengan keterlibatan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam dunia perpolitikan, baik itu dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), Pileg (Pemilihan Legislatif), hingga pemberian posisi berupa jabatan-jabatan strategis lainnya (Bó dkk., 2007; Purwaningsih, 2015; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).

Indonesia sendiri mengalami beberapa kasus dinasti politik, diantaranya yang paling terkenal ialah dinasti politik Provinsi Banten (Cahyaningtyas, 2017; Sutisna, 2017), kemudian dinasti politik di Kabupaten Kediri (Bimantara & Harsasto, 2018; Cahyaningtyas, 2017), dan dinasti politik Kabupaten Klaten (Susanti, 2018). Semua dinasti politik tersebut menunjukkan bahwa gejala mengakarnya dinasti politik di Indonesia sudah sangat mendalam. Semestinya demokrasi hadir untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada rakyat agar dapat terlibat dalam proses politik (Susanti, 2018). Mengkristalnya oligarki-oligarki di daerah pasca reformasi juga menjadi pemicu dinasti politik,

proses dinamika politik di daerah tersebut hanya diatur oleh segelintir elit politik lokal sehingga dalam perputaran kontestasi politik di daerah tersebut hanya diwarnai oleh kalangan mereka saja (E. Hidayat, 2018; E. Hidayat dkk., 2019).

Dalam penelitiannya Sutisna (2017) dan Suharto dkk, (2017) menemukan bahwa eksistensi terbentuknya dinasti politik di pemerintahan daerah sangat tinggi, hal ini didasari pada hasil rilis Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengungkapkan dalam kurun waktu 2013 yang lalu terdapat 57 Kepala Daerah yang melakukan praktik dinasti politik. Kemudian dalam kurun waktu 3 tahun yakni di tahun 2016 tingkat praktik dinasti politik mengalami peningkatan menjadi lebih dari 65 kepala daerah. Suharto dkk, (2017) memandang dinasti politik sampai hari ini masih menimbulkan perdebatan, beberapa kalangan menilai dinasti politik sangat berpengaruh negatif karena dapat menyebabkan penyalagunaan kekuasaan. Sementara itu beberapa kalangan lain berpendapat bahwa dinasti politik tidak berhubungan dengan perilaku korupsi pejabat publik.

Pahrudin (2018) dalam penelitiannya menyebutkan dinasti politik ini juga memiliki sisi positif karena calon yang berkompetisi dalam pemilihan tingkat lokal sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat dan sudah memiliki bekal politik dalam keluarganya, yang pada akhirnya menjadikan dia lebih unggul. Calon ini sudah mempunyai histori politik yang panjang sesuai dengan eksistensi keluarga terdahulu.

Politik dinasti ada beberapa model, model politik dinasti di Indonesia menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ada tiga. Pertama model arisan, dimana kekuasaan hanya menggumpal pada satu kalangan atau keluarga, dan berjalan secara regenerasi. Kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis. Ketiga, model lintas daerah. Daerah-daerah yang berbeda disuatu provinsi dipimpin masih dalam satu keluarga (Suharto et al., 2017).

Mendoza dkk, (2016) serta Rusnaedy & Purwaningsih (2018) dalam penelitian mereka menemukan bahwa calon dari kalangan dinasti politik cenderung lebih memiliki kekuatan sumber daya finansial yang lebih besar daripada calon dari kalangan diluar lingkaran

dinasti politik, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih. Dinasti politik dalam perkembangannya juga diistilahkan dengan politik kekerabatan. Purwaningsih (2015) kemudian juga berpendapat bahwa politik kekerabatan sebagai upaya regenerasi kuasa politik yang ditujukan kepada anggota keluarga dengan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, namun atas dasar hubungan kekerabatan kepada sang pemegang kuasa saat itu. Lebih lanjut purwaningsih juga menambahkan tentang terdapat tiga tipe politik kekerabatan. Pertama, politik kekerabatan oligarki-meritokratik yang memandang politik kekerabatan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki kandidat. Kedua, politik kekerabatan transaksional yang disandarkan pada transaksi politik/balas budi anatara dua pihak. dan yang Ketiga, politik kekerabatan pragmatis dimana politik kekerabatan yang memandang kepentingan jangka pendek untuk meningkatkan jumlah perolehan suara (Purwaningsih, 2015).

Selain itu Purwaningsih (2015) menambahkan terdapat beberapa catatan mengenai fenomena politik kekerabatan yaitu, pertama; terdapat keinginan yang cukup kuat dari petahana untuk mempertahankan kekuasaan dengan membentuk keluarga politik di tingkat lokal, baik di Jawa maupun luar Jawa. Kedua; kecenderungan pembentukan politik kekerabatan ternyata didukung oleh partai-partai besar di lembaga perwakilan yang berarti juga memperoleh dukungan dari elit politik. Dukungan partai-partai besar pada kandidat dari keluarga petahana yang bahkan bukan berasal dari kader partai-menunjukkan masih lemahnya partai politik sebagai instrumen demokrasi, yang lebih mengandalkan kepada aspek popularitas kandidat. Ketiga; dari hasil penelitian awal disertasinya, Purwaningsih juga menemukan fenomena politik kekerabatan yang paling kuat terjadi di provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Neni Moerniaeni berpasangan dengan Basri Rase terpilih menjadi Walikota Bontang periode 2016-2021 dengan mengalahkan kandidat petahana Walikota Bontang sebelumnya (periode 2011-2016) yaitu Adi Darmaberpasangan dengan Isro Umarghani. Terpilihnya Neni Moerniaenisebagai

Walikota Bontang menandakan berlanjutnya dinasti politik yang telah diwariskan oleh sang suami Andi Sofyan Hasdam yang merupakan Walikota Bontang sebelumnya yang menjabat selama dua periode dari tahun 2001-2011. Hal yang menarik dalam politik Kota Bontang ini ialah keterlibatan keluarga politik dari Andi Sofyan Hasdam dalam lingkaran penguasa Kota Bontang baik di dalam ranah eksekutif maupun ranah legislatif. Diketahui ketika Andi Sofyan Hasdam masih menjabat sebagai walikota bontang periode kedua 2006-2011 sang istri Neni Moerniaeni juga menduduki posisi penting di legislatif sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang 2004-2009 dan kemudian berlanjut sebagai Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2009-2014. Yang kemudian tradisi tersebut dilanjutkan kembali dimasa kepemimpinan Neni Moerniaeni sebagai walikota dimana anaknya sendirilah Andi Faisal Sofyan Hasdam yang menjadi Ketua DPRD Bontang Periode 2019-2024.

Menurut Kurtz (1989) dalam artikelnya yang berjudul *"The Political Family: A Contemporary View"* mensyaratkan sebuah political family harus didasarkan minimal 2 orang dalam keluarga yang terlibat dalam perpolitikan dan menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam kasus Kota Bontang persyaratan tersebut telah terpenuhi dengan terlibatnya suami istri kemudian dilanjutkan dengan ibu dan anak dalam menempati posisi-posisi dan jabatan strategis baik di tingkat legislatif dan eksekutif pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, Meskipun penelitian politik dinasti cukup baru namun penelitian tentang politik kekerabatan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia, berbagai macam fenomena disetiap daerah memiliki kesamaan dalam hal orientasi tujuan akhir sebuah dinasti politik yakni guna untuk kekuasaan politik dapat dikuasai secara turun temurun. Ada beberapa pembeda dalam penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya, yakni penulis mengangkat Kota Bontang sebagai objek penelitian dimana sebelumnya belum terdapat penelitian terkait politik dinasti di Kota Bontang. Penulis ingin melihat sejauh mana jalannya politik dinasti di kota bontang yang berbentuk keluarga politik dan apakah berdampak terhadap perkembangan Kota Bontang.

Tabel 1. Penelitian-penelitian Terdahulu Terkait Politik Dinasti

No	Nama Peneliti	Tema	Hasil Penelitian
1	Syarif Hidayat (S. Hidayat, 2007)	Shadow State, Bisnis dan politik di Banten	Permasalahan politik lokal di Banten terjadi karena pergeseran interaksi antara state dan society, terutama pada interaksi local state actors (elit pemerintahan) dan societal actors (jawara pengusaha), dan terjadi shadow state dengan peran Tuan Besar.
2	Andi Faisal Baktiv (Bakti, 2008)	Kekuasaan Keluarga di wajo, Sulawesi Selatan	Desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis.
3	Nilam Cahyaningtiyas Mohammad Arif Affandi(2017)	Politik Dinasti di Kabupaten Kediri	Keberhasilan dinasti politik dalam pilkada dipengaruhi oleh faktor incumbent dan aspek pribadi dari calon seperti kepribadian, pengalaman dan kemampuan calon
4	Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff(2009)	Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik	Reformasi politik hanyalah ilusi karena politik lokal di Indonesia memunculkan local strongmen yang menguasai ekonomi politik.
5	Buehler (Buehler & Tan, 2007)	Pilkada di Gowa	Ikatan partai dengan calon dalam pilkada lebih didasarkan atas kepentingan pendanaan partai sehingga partai cenderung memilih calon yang mempunyai modal yang besar
6	Wasisto Raharjo Djati(2015)	Familisme dalam demokrasi lokal	Familisme dipengaruhi oleh berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme, dan feodalisme, yang ketiganya membentuk tipologi rejim dinasti politik yang berbeda di Indonesia
7	Purwaningsih (2015)	Politik Kekerabatan di Sulawesi Selatan pada Era Reformasi	Menunjukkan bahwa tidak semua politisi yang berasal dari keluarga politik merupakan manifestasi dari politik kekerabatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk memahami tentang apa yang terjadi di lapangan yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam rangkaian kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan dari studi literatur berupa artikel-artikel terdahulu, media masa berita online, website-website yang berhubungan guna mendukung pengumpulan data.

Kemudian dalam penekanannya penelitian ini bersifat interpretif dimana menekankan kepada interpretasi makna atas sebuah fenomena sosial, guna mempelajari pandangan-pandangan khusus pada subjek penelitian (Fithriana, 2016; Miles, Matthew B dan Huberman, 2009; Purwaningsih, 2015). Hal yang mendasari penulis memilih Kota Bontang dalam penelitian ini karena Kota Bontang dalam hampir 18 tahun telah dipimpin oleh

keluarga Andi Sofyan Hasdam dan Istrinya Neni Moerniaeni yang menggantikannya menjabat sebagai walikota. Andi Sofyan Hasdam menjabat sebagai Walikota Bontang sejak tahun 2001 s.d 2011 sementara sang istri Neni Moerniaeni menjabat sebagai Walikota Bontang pada tahun 2015 s.d 2020. Selain itu yang menarik untuk kasus Kota Bontang ketika Andi Sofyan Hasdam menjabat Walikota di periode keduanya, bersamaan dengan terpilihnya sang istri sebagai DPRD Kota Bontang dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD 2004-2009 dan Ketua DPRD Periode 2009-2014. Begitu halnya sekarang ketika Neni Moerniaeni terpilih sebagai Walikota Bontang Periode 2015-2020 bersamaan dengan anak keduanya Andi Faisal Sofyan Hasdam yang terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi dari sumber-sumber tertulis berupa jurnal-jurnal ilmiah, berita media online, dan laporan-laporan pemerintahan melalui situs-situs resmi pemerintahan daerah. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui profil

kandidat, perolehan suara, dan informasi-informasi pendukung lainnya. Data sumber-sumber tertulis yang diperoleh kemudian di lakukan pengelolaan secara cermat oleh penulis, sementara data media online dilakukan pengelolaan menggunakan Nvivo 12 Plus, melalui coding analisis daripada hasil n-capture dari media online bereputasi kemudian diproses menggunakan fitur tools explore crosstab NVivo 12 Plus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Bontang

Kota Bontang merupakan wilayah kecamatan yang dulunya berada di Kabupaten Kutai yang kemudian dalam perkembangannya menjadi kota otonom pada tahun 1999, perkembangan pesat kota bontang salah satunya karena didukung oleh keberadaan industri PT. Badak NGL yang mengelola industri gas alam dan PT. Pupuk Kaltim yang mengelola industri pupuk dan amoniak (Wahyudi dkk., 2019) Bontang has been growing rapidly especially for population and regional development. This study was aimed to (a.

Sejak disahkannya Perda Kota Bontang No.17 Tahun 2002 area kota bontang terbagi menjadi 3 kecamatan yakni Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat. Secara keseluruhan di Kota Bontang terdapat 15 kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan terdiri atas 6 kelurahan (Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah), Kecamatan Bontang Utara terdiri atas 6 Kelurahan (Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai, Lok Tuan, dan Guntung), sementara itu Kecamatan Bontang Barat terdiri atas 3 Kelurahan (Kanaan, Gunung Telihan, dan Belimbing) (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2018).

Dalam perjalanannya Kota bontang sudah memiliki 3 Walikota, dimana Andi Sofyan Hasdam 1999-2001 sebagai PJ Walikota, kemudian beliau melanjutkan sebagai Walikota pertama terpilih hingga dua periode 2001-2011 berpasangan bersama Sjahid Daroini. Kemudian kepemimpinan Kota Bontang kedua diemban oleh Adi Darma berpasangan dengan Isro Umarghani 2011-2016. Kemudian kepemimpinan ketiga hingga saat ini di pimpin oleh Neni Moerniaeni berpasangan Basri Rase 2016-2021. Neni Moerniaeni merupakan istri dari Andi Sofyan Hasdam Walikota pertama Kota Bontang.

Dinasti Politik di Kota Bontang

Kepemimpinan legislatif dan kepemimpinan eksekutif di Kota Bontang pernah berada dibawah naungan suami dan istri yang mana Andi Sofyan Hasdam menjabat sebagai Walikota Kota Bontang pada periode keduanya, yang kemudian di barengi dengan Istrinya Neni Moerniaeni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang dan kemudian sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2009-2014. Terpilihnya Neni Moerniaeni sebagai ketua DPRD Kota Bontang dikarenakan keberhasilannya dalam memperoleh suara masyarakat dalam pemilihan legislatif 2009. Sebelum menduduki kursi ketua DPRD Kota Bontang Neni Moerniaeni telah menduduki kursi wakil rakyat Kota Bontang semenjak periode 2004-2009 sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang. Hal ini menunjukkan bahwa calon kandidat dari kalangan dinasti politik lebih memiliki kekuatan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dalam memimpin (Cahyaningtyas, 2017), karena masyarakat memiliki anggapan bahwa mereka lebih berkompeten dan memiliki modal daya finansial yang lebih kuat sehingga dengan mudah keluarga kalangan yang berkuasa untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan (Mendoza dkk., 2016; Pahrudin, 2018; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).

Tidak hanya sampai disitu pada saat Neni Moerniaeni menjabat sebagai Walikota Bontang periode 2016-2021, di periode itu pula anak keduanya Andi Faisal Sofyan Hasdam juga dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024. Hal ini tentu saja kembali mengkonfirmasi pendapat Purwaningsih (2015) yang mengatakan bahwa keterlibatan istri dan anak dalam politik kekeluargaan merupakan upaya untuk regenerasi kekuasaan politik, yang tentu saja dalam upaya tersebut diwujudkan dengan berbagai macam cara yang terkadang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan maupun sebaliknya.

Perolehan suara Andi Faisal Sofyan Hasdam dalam Pemilu legislatif 2019 sebanyak 4.640 suara, itu merupakan perolehan suara terbanyak yang diraih dari seluruh calon DPRD Kota Bontang. hal ini menunjukkan bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang besar untuk memenangkan pemilu (Bó et al., 2007; Labonne et al., 2017; Mendoza et al., 2012). Selain itu

Norris & Lovenduski (1993) juga menegaskan bahwa ada dua hal yang menyebabkan anggota keluarga masuk dan terlibat didalam perpolitikan yaitu motivasi dan modal politik, motivasi dan modal politik inilah yang diyakini menjadi dasar bagi Andi Faisal Sofyan Hasdam sebagai seorang anak dari Ayah yang seorang mantan Walikota dua periode dan Ibu yang juga menjabat sebagai Walikota aktif pada saat itu untuk terjun kedalam politik dan mengemban amanah yang diberikan rakyat kepadanya.

Keinginan seorang anak untuk melanjutkan karir politik atau warisan politik keluarga kedepannya merupakan hal yang sudah sewajarnya dalam praktik keluarga politik, hal ini menurut Prewitt (dalam Kurtz, 1989) disebabkan karena adanya ketertarikan politik seorang anak yang diwariskan dari orang tua kemudian terjadi penyerahan kepercayaan orang tua kepada anaknya untuk terlibat dalam pekerjaan politik yang orang tuanya sedang jalani. Purwaningsih (2015) juga menjelaskan terdapat aspek sosialisasi dari orang tua terhadap anak yang menjadi salah satu faktor munculnya politik kekeluargaan. Hal ini pun secara teori telah menjawab alasan dari Andi Faisal Sofyan Hasdam untuk terjun keranah politik selain untuk meneruskan warisan dinasti politik yang kedua orang tuanya telah bangun di Kota Bontang, secara aspek personal Andi Faisal Sofyan Hasdam juga telah memenuhi kriteria dalam mengemban amanah warisan politik kekeluargaan yang dia dapatkan, ini dikarenakan kemampuan aktivitas politik, kemampuan identifikasi partai politik, serta pengetahuan dan keterampilan politiknya sudah terbentuk (Martinez, 2010).

Perjalanan politik kekeluargaan Kota Bontang sempat terhenti dalam satu periode kepemimpinan yakni di tahun 2011-2016. Hal ini dikarenakan kekalahan Neni Moerniaeni berpasangan dengan Irwan Arbain dalam pemilihan Walikota Bontang tahun 2010 melawan pasangan Adi Darma berpasangan dengan Isro Umarghani. Sengketa hasil Pilwali Kota Bontang telah dilayangkan oleh Neni Moerniani-Irwan Arbain namun dalam keputusannya mahkamah menilai permohonan yang diajukan belum terbukti sehingga dalam keputusan eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait (Jppn.com, 2011).

Karir politik Neni Moerniaeni tidak selesai disitu, meskipun pada 2010 gagal dalam Pilwali

Kota Bontang. Berlanjut pada tahun 2014 Neni Moerniaeni kembali ikut berkompetisi dalam Pemilihan Legislatif DPR RI melalui partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dengan nomor urut 5 dengan perolehan suara sebanyak 61.405 suara (Rahman, 2018). Keberhasilan Neni Moerniaeni dalam pemilihan legislatif 2014 ditunjang dari aspek kepribadiannya yang dipandang baik oleh masyarakat Kota Bontang serta kemampuan daripada seorang yang berasal dari lingkungan keluarga politik yang dianggap dalam persepsi masyarakat sebagai sosok yang mampu serta memiliki pengalaman dalam menempati posisi-posisi strategis mewakili Kota Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur (Cahyaningtyas, 2017).

Karir Neni Moerniaeni di DPR RI tidak berlangsung lama, setelah sempat bertugas di Komisi VII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lingkungan hidup kemudian berpindah ke Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan. Pada tanggal 10 Juni 2015 Neni Moerniaeni mengundurkan diri dari DPR RI dan kemudian kembali mengikuti pertarungan dalam Pilkada memperebutkan kursi Walikota Bontang berpasangan dengan Basri Rase pada Pilwali Kota Bontang tahun 2015 (Rahman, 2018).

Perjuangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase dalam pemilihan Walikota Bontang tidak berjalan dengan mudah, meskipun Neni Moerniaeni pada saat itu hingga saat ini masih menjadi kader partai Golkar Kota Bontang namun DPP Golkar dalam Pilwali Kota Bontang tahun 2015 tidak memberikan dukungannya kepada Neni Moerniaeni untuk maju dalam perhelatan. Malah sebaliknya DPP Golkar memberikan dukungannya kepada pasangan Adi Darma dan Isro Umarghani yang dimana Adi Darmajuga merupakan kader aktif dari partai Golkar. Sementara itu Neni Moerniaeni dan Basri Rase mengajukan diri sebagai Calon walikota bontang melalui jalur independent dengan menyertakan 24.000 KTP bukti dukungan masyarakat, jumlah tersebut diatas dari ketentuan standar yang telah ditetapkan KPU Bontang sebanyak 16.000 KTP (Klik Bontang, 2015). Secara mengejutkan dalam pemilihan pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rasedapat mengalahkan pasangan Adi Darma dan Isro Umarghani.

Berikut dilampirkan tabel Penetapan Reka-pitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pilwali Kota Bontang Tahun 2015:

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2015 Kota Bontang

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Neni Moerniaeni Basri Rase	44.300	35,7 %
2	Adi Darma Isro Umarghani	35.018	28,2%

Sumber: Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor: 57/Kpts/KPU-Btg/021/436172/2015

Kemenangan yang mengejutkan diraih oleh pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase, meskipun melawan pasangan petahana Adi Darma dan Isro Umarghani pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase mampu untuk mengungguli perolehan suara hingga mencapai 7,5% dengan selisih jumlah suara mencapai 9.282 suara. Kemenangan dalam Pilwali 2015 ini seolah-olah kembali menunjukkan bahwa kekuatan keluarga politik dari pasangan suami istri Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni masih eksis dan mampu untuk mengambil kembali kursi kekuasaan tertinggi di kota Bontang dengan memenangkan Pilwali Kota Bontang 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Bontang masih memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada kalangan keluarga politik, persepsi yang muncul beranggapan bahwa keluarga politik memiliki modal pengalaman dan kemampuan dalam memimpin serta dapat memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum (Cahyaningtyas, 2017; Mendoza dkk., 2016; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018), meskipun dalam Pilwali 2010 Neni Moerniaeni mengalami kekalahan namun di Pilwali 2015 Keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni membuktikan kembali bahwa keluarga politik mereka masih aktif dan layak memimpin Kota Bontang.

Model Politik Dinasti di Kota Bontang

Menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ada tiga model politik dinasti di Indonesia, pertama model arisan, dimana kekuasaan hanya menggumpal pada satu kalangan atau keluarga, dan berjalan

secara regenerasi, kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis, ketiga, model lintas daerah. Daerah-daerah yang berbeda disuatu provinsi dipimpin masih dalam satu keluarga (Suharto dkk., 2017).

Dari ketiga model diatas diketahui bahwa dalam jalannya politik dinasti Kota Bontang lebih kepada point pertama model arisan dan point kedua model lintas kamar. Untuk model arisan ditunjukkan dari pada kekuasaan pemerintahan yang dikuasai oleh satu keluarga politik yakni pasangan Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni yang kemudian dilanjutkan kepada generasi selajutnya yakni anaknya sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024.

Sementara itu untuk model lintas kamar ditunjukkan dengan penguasaan cabang kekuasaan baik di tingkat eksekutif dan legislatif yang mana ditunjukkan sejak tahun 2004 oleh keluarga politik pasangan Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni yang selalu menduduki posisi-posisi strategis baik sebagai Walikota, Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPRD Kota Bontang.

Pencapaian Keluarga Politik Dalam Membangun Kota Bontang

Kota Bontang memiliki laju pertumbuhan penduduk hingga 4,4%, angka ini merupakan angka tertinggi di Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan kota utama seperti Balikpapan dan Samarinda yang masing-masing sekitar 3,8% dan 3,9% (Wahyudi dkk., 2019) Bontang has been growing rapidly especially for population and regional development. This study was aimed to (a.

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 adalah 174.206 jiwa. Penyebaran jumlah penduduk terbagi di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 67.960 jiwa (39,01%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 69.652 jiwa (39,98%) dan di Kecamatan Bontang Barat 36.594 jiwa (21,01%). Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2018 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat besarnya berturut-turut adalah 627 jiwa/km²; 2.180 jiwa/km²; dan 2.048 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2018).

Tabel 3. Daftar Penghargaan yang diterima Kota Bontang

No	Penghargaan	Tahun
1	Wali Kota terbaik se-Indonesia Indonesia Innovatiaon Award (IIA)	2019
2	Piala Adipura yang ke-10	2019
3	Penghargaan Presidential Lecture dan Awarding gerakan menuju 100 Smart City	2019
4	Penghargaan Innovative Government Award (IGA)	2019
5	Perempuan Hebat Kepala Daerah 2019 yang digelar Majalah Sindo Weekly	2019
6	Layanan Perizinan Usaha Keliling (Lapusing)	2019
7	Bunda PAUD Terbaik Nasional Kemendikbud	2019
8	Menghadiri “The 2019 World Cities Summit and Mayors Forum (WCSMF)” DI Medellin, Kolombia	2019
9	Piala Natamukti 2018 Kementrian Koperasi dan UKM	2018
10	Anugrah Pandu Negeri 2018 dengan predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik dai Indonesia Institute Publik Governance (IIPG)	2018
11	Penghargaan Nata Mukti	2018
12	Anugrah Pandu Negeri	2018
13	Penghargaan Innovative Government Award (IGA)	2018
14	Penghargaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Kellog Innovation Network (KIN) ASEAN	2017
15	Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2017 dan 2018
16	Anugerah Pangripta Nusantara Kaltim	2018
17	Penghargaan Bhumandala	2017 dan 2018
18	Penghargaan Panji, Trophy dan Piagam Keberhasilan Pembangunan Kaltim	2017 dan 2018
19	Penghargaan Kota Cerdas	2018
20	Penghargaan Desa Maritim Award	2018
21	Niwasita Tantra Green Leadership	2018
22	Peringkat I Smart Region Maturity Index (SRMI)	2016
23	Peringkat 5 Smart Region Maturity Index (SRMI)	2015
24	Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah	2016
25	Penghargaan Kota Berkinerja Terbaik	2016
26	Penghargaan Entrepreneur Award 2017	2017
27	Penghargaan Innovative Government Award (IGA)	2017
28	Menurunkan angka kemiskinan di daerah.	2015-2016

Sumber : Diolah penulis dari berbagai berita online bereputasi

Pada tabel diatas menunjukkan beberapa penghargaan yang telah didapatkan oleh Neni Moerniaeni dan Basri Rase dalam memimpin Kota Bontang 2016-2021. Berbagai Inovasi pembangunan dan pelayanan telah dilakukan dalam kepemimpinan Neni Moerniaeni dan Basri Rase saat memimpin Kota Bontang periode 2016-2021. Dimana inovasi pelayanan tersebut mendapatkan respon baik dari masyarakat Kota

Bontang, inovasi-inovasi yang telah berjalan tersebut antara lain Program Pendidikan Anak-anak Pulau (Prodikau), Internet Gratis bagi Komunitas Nelayan Kepulauan dan Pesisir (Interkonesi), Perizinan Jemput Bola (Papi Jempol), dan Sistem Administrasi Pelayanan Masyarakat Tanpa Menunggu (Sapa Ratu) (Rahman, 2018). Dalam pelaksanaan inovasi tersebut tergambar bahwa pemerintah kota

bontang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dan menerapkan praktek good Practice E-Government(Salsabila & Purnomo, 2017).

Pencapaian Neni Moerniaeni dan Basri Rase selama memimpin Kota Bontang:

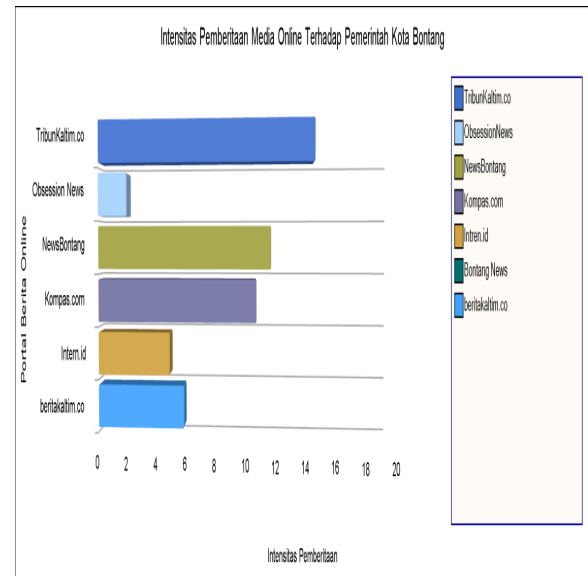
Tabel 4. Daftar pencapaian yang diraih selama memimpin Bontang

No	Keberhasilan
1	Pembagian 38.500 Paket Seragam Gratis
2	Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Untuk Semua
3	Peningkatan Kesejahteraan Kehidupan Sosial
4	Terwujudnya Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
5	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
7	Meningkatkan Akses Pelayanan Air Minum
8	Banjir yang Bisa Ditangani dengan Baik
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
10	Tersedianya Infrastruktur Kota untuk Menukung Pertumbuhan Ekonomi Kota
11	Banyaknya Pembangunan Tanpa APBD Bontang
12	Kebahagiaan Ribuan Honorer Sambut Gaji Senilai UMK
13	Tangani Banjir melalui Prokasih
14	Buat Inovasi Penyulingan Air Laut di Pesisir
15	Menjadikan Bontang Sebagai Kota Cerdas di Indonesia
16	Peduli Tenaga Pendidik, dan Pegiat Agama
17	Mudahkan Pelaku UKM dengan Dana Bergulir
18	Taman Gym Gratis
19	Program Rp 200 Juta Produkta

Sumber: Syakira(2019)

Dari tabel diatas penulis mencoba untuk menunjukkan terkait prestasi-prestasi pencapaian yang telah diperoleh oleh pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase, keberhasilan-keberhasilan yang diperoleh oleh keluarga politik dalam menjalankan amanah kepemimpinan tidak lepas dari faktor pengalaman dan kemampuan dalam mengelola dan memimpin pemerintahan di Kota Bontang(Mendoza et al., 2016; Pahrudin, 2018; Rusnaedy &

Purwaningsih, 2018), prestasi ini tentu tidak dilakukan Neni Moerniaeni sendirian, ada sang suami Andi Sofyan Hasdam yang selalu mendukung dan memberikan masukan dengan sejuta pengalaman yang telah dia miliki dalam memimpin Kota Bontang selama dua periode lebih kepemimpinannya.



Gambar 1. Intensitas Pemberitaan Media Online Terhadap Pemerintah Kota Bontang

Sumber: Hasil Coding media berita online menggunakan Nvivo 12 Plus

Tabel 4 diatas diproses menggunakan fitur tools explore crosstab di dalam NVivo 12 Plus, sumber data diambil dari beberapa pemberitaan media online selama periode tahun 2015-2019 yakni TribunKaltim.co, ObsessionNews, NewsBontang, Kompas.com, Intern.Id, Bontang News, dan beritakaltim.co. Dari tabel diatas menunjukkan intensitas pemberitaan media online atas jalannya pemerintahan serta pembangunan periode Neni Moerniaeni dan Basri Rase selama tahun 2015-2019, dimana portal berita online TribunKaltim.co menempati posisi pertama sebagai media pemberitaan online yang paling banyak memberitakan berita tentang jalannya pemerintahan kota bontang.\

Dalam pemberitaan media-media online tersebut banyak sekali ditemukan pemberitaan yang bersentiment positif terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Bontang yang dipimpin oleh Neni Moerniaeni dan Basri Rase. Song & Lee(2016) menilai media online adalah sebuah sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

SIMPULAN

Politik dinasti atau keluarga politik di Kota Bontang telah terjadi dan berjalan selama kurang lebih 18 tahun, dimana pasangan keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam menjadi keluarga politik yang selalu eksis di Kota Bontang hingga sampai saat ini. Keunggulan modal politik, ekonomi dan kepercayaan masyarakat menjadikan keluarga politik dengan mudah menduduki posisi-posisi strategis melalui proses demokratis dengan memenangkan suara masyarakat melalui pemilihan umum baik Pemilihan Walikota Kota Bontang dan Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bontang.

Model politik dinasti yang terjadi dalam Kota Bontang ialah model arisan dan model lintas kamar, dimana model arisan menunjukkan bahwa dalam berjalannya kekuasaan di kota bontang diwujudkan dengan upaya pemberian kekuasaan dan regenerasi kepada satu keluarga yakni keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni. Sementara itu untuk model lintas kamar ditunjukkan dengan pembagian cabang kekuasaan dimana saat Andi Sofyan Hasdam menjabat sebagai Walikota Bontang periode 2001-2011 dan istrinya Neni Moerniaeni menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang 2004-2009 dan Ketua DPRD Kota Bontang 2009-2014, kemudian hal ini berulang kembali saat sang istri Neni Moerniaeni menjabat sebagai Walikota Kota Bontang periode 2016-2021 sang anak Andi Faisal Sofyan Hasdam menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024.

Dalam prestasi pembangunan Kota Bontang ditemukan kepercayaan publik terhadap kemampuan keluarga politik dalam memimpin, kehadiran keluarga politik memberikan dampak yang positif hal ini ditunjukkan dengan berbagai macam program, prestasi, serta penghargaan yang diterima Kota Bontang dalam periode keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni memimpin Kota Bontang. Melalui analisis intensitas pemberitaan media online juga ditemukan beragam pemberitaan media yang positif atas jalannya pemerintahan di Kota Bontang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Yusoff, M. . (2010). Dinasti Politik di Banten pasca Orde Baru: Sebuah Amatan Singkat. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 79–97.
- Agustino, Leo, & Yusoff, M. A. (2009). Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik, Dan Masalah Pembangunan*, 5(1), 415–443.
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2018). *Statistik Daerah Kota Bontang 2018*.
- Bakti, A. F. (2008). Kekuasaan Keluarga di Wajo. *Politik Lokal Di Indonesia*, 1988.
- Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*.
- Bimantara, N., & Harsasto, P. (2018). Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 201–210.
- Bó, E. D., Cattaneo, M., Tella, R. Di, Foster, A., Galor, O., Hallak, J. C., Knight, B., Levine, D., Mas, A., Moretti, E., Olken, B., Roland, G., & Shepsle, K. (2007). *Dal Bó, Dal Bó y Snyder. Political Dynasties*.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84(84), 41–69.
- Cahyaningtyas, N. (2017). Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri : Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa SI Sosiologi UNESA*, 6(1), 1–8.
- Djati, W. R. (2015). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>
- Farhani, F., & Rosnidah, I. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran

- 2011- 2015). “*REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi*,” 3(1). <https://doi.org/10.33603/reformasi.v3i1.1788>
- Fithriana, A. ; J. A. (2016). Perbandingan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Thailand. *Jurnal Sawala*, 4(2), 12–25.
- Hidayat, E. (2018). Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 124–151. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/6795/6096>
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>
- Hidayat, S. (2007). “Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten. *Politik Lokal Di Indonesia*, 267–303.
- Jppn.com. (2011). *Keputusan KPU Kota Bontang Disahkan MK*. <https://www.jpnn.com/news/keputusan-kpu-kota-bontang-disahkan-mk>
- Klik Bontang. (2015). *Bawa 24 Ribu KTP, Neni-Basri Lolos Persyaratan Pilwali Bontang 2015*. <http://www.klikbontang.com/berita-1845-bawa-24-ribu-ktp-nenibasri-lolos-persyaratan-pilwali-bontang-2015.html>
- Komar. (2013). DINASTI KEPALADESA (Studi Tentang Survivabilitas Dinasti Politik di Desa Puput Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah). In *Ugm*.
- Kurtz, D. M. (1989). The political family: A Contemporary View. *Sociological Perspectives*, 32(3), 331–352. <https://doi.org/10.2307/1389121>
- Labonne, J., Parsa, S., & Querubin, P. (2017). Political Dynasties, Term Limits and Female Political Empowerment: Evidence from the Philippines. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2930380>
- Malik, A. S. (2014). Analisis Konvergensi Antar Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012. In *Jejak (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan)* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3846>
- Martinez, L. M. (2010). Politicizing the family: How grassroots organizations mobilize Latinos for political action in Colorado. *Latino Studies*, 8(4), 463–484. <https://doi.org/10.1057/lst.2010.54>
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. (2012). An Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress. *SSRN Electronic Journal*, October 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1969605>
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Political dynasties and poverty: measurement and evidence of linkages in the Philippines. *Oxford Development Studies*, 44(2), 189–201. <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264>
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. M. (2009). Manajemen Data dan Metode Analisis dalam Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (eds.) Handbook of Qualitative Research. Norman K Denzin Dan Yvonna S. Lincoln, Terjemahan Dariyatno, Dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohamad Agus Yusoff, Agustino, L. E. O. (2012). Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 39(July), 75–96.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Nordholt, H. S. (2005). *Desentralisasi di Indonesia: Peran Negara Kurang, Lebih Demokratis?*
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1993). ‘If Only More Candidates Came Forward’: Supply-Side Explanations of Candidate Selection in Britain. *British Journal of Political Science*, 23(3), 373–408. <https://doi.org/10.1017/S0007123400006657>
- Pahrudin, P. (2018). Dinasti Politik Pemerintah Desa Di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Arajang*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.31605/arajang.v1i1.45>

- Purwaningsih, T. (2015). *Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009)*. 1–90.
- Rahman, A. (2018). *Neni Moerniaeni dan 16 Inovasi Pelayanan Publik yang Menakjubkan*. <https://www.obsessionnews.com/neni-moerniaeni-dan-16-inovasi-pelayanan-publik-yang-menakjubkan/>
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.116>
- Salsabila, L., & Purnomo, E. P. (2017). Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study : e-Government Implementation between Korea and Indonesia). *Asean/ Asia Academic Society International Conference (Aasic)*, 5, 221–229.
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>
- Song, C., & Lee, J. (2016). Citizens Use of Social Media in Government, Perceived Transparency, and Trust in Government. *Public Performance and Management Review*, 39(2), 430–453. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1108798>
- Suharto, D. G., Dwi, I., Nurhaeni, A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. (2017). *Pilkada, politik dinasti, dan korupsi*. 1983, 30–49.
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- Syakira, R. (2019). 20 Keberhasilan Pemerintahan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. <https://kaltimtoday.co/20-keberhasilan-pemerintahan-wali-kota-bontang-neni-moerniaeni/>
- Wahyudi, M. E., Munibah, K., & Widiatmaka, W. (2019). Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kota Bontang, Kalimantan Timur. *Tataloka*, 21(2), 267. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.2.267-284>